

# **RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025-2029**

**BRIDA PROVINSI NTB  
TAHUN 2025**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
NUSA TENGGARA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB maka perlu dilakukan Perbaikan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang lebih terkoordinasi.

Rencana Strategis dibuat didasarkan pada : (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (6) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kami menyadari dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen. Akhirnya semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan untuk menyusun kebijakan dalam bidang riset dan inovasi. Sekian dan terima kasih.

Mataram, Oktober 2025  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi NTB,



**I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196703201989031013

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1</b>	<b>Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2</b>	<b>Landasan Hukum</b> .....	3
<b>1.3</b>	<b>Maksud dan Tujuan</b> .....	6
<b>1.4</b>	<b>Sistematika Penulisan</b> .....	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU</b> .....	8
<b>2.1</b>	<b>Gambaran Pelayanan BRIDA</b> .....	8
2.1.1	Capaian Kinerja BRIDA .....	9
2.1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BRIDA Provinsi NTB.....	22
2.1.3	Sumber Daya BRIDA .....	31
2.1.4	Kinerja Pelayanan BRIDA.....	34
2.1.5	Kelompok Sasaran Layanan .....	37
<b>2.2</b>	<b>Permasalahan dan Isu Strategis BRIDA</b> .....	38
2.2.1	Permasalahan Pelayanan BRIDA.....	38
2.2.2	Isu strategis.....	39
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	44
<b>3.1</b>	<b>Tujuan Sasaran Perangkat Daerah</b> .....	45
<b>3.2</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah</b> .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	60
<b>4.1</b>	<b>Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif).</b> .....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	153

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi NTB dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB.

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi NTB, dinyatakan bahwa BRIDA Provinsi NTB melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Perumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan dokumen Renstra ini harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi NTB, baik dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan khususnya yang terkait dengan aspek penelitian, pengembangan dan inovasi di daerah.

Renstra BRIDA Provinsi NTB 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai fondasi awal dalam implementasi **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2025-2045**. Lima tahun pertama dari RPJPD ini difokuskan pada **penguatan fondasi pembangunan daerah** guna menciptakan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Dengan arah pembangunan yang sistematis dan terencana, periode ini akan menjadi momentum penting dalam membangun masa depan Provinsi NTB yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan di Provinsi NTB akan menghadapi berbagai tantangan, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perubahan dinamika global, perkembangan teknologi, serta dampak perubahan iklim juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Renstra BRIDA Provinsi NTB 2025-2029 harus mampu merumuskan kebijakan yang inovatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Penyusunan Renstra ini juga didasarkan pada evaluasi kinerja pembangunan dalam periode sebelumnya dengan mengidentifikasi capaian, kendala, serta pelajaran yang dapat menjadi dasar dalam merancang strategi yang lebih efektif. Dalam prosesnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci utama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, serta semua stakeholder terkait guna memastikan perencanaan yang lebih komprehensif dan implementatif.

Melalui Renstra BRIDA Provinsi NTB 2025-2029 ini, diharapkan akan terwujud perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, sinergis, dan berkelanjutan dalam mendukung visi besar pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berbasis bukti, serta memperkuat peran BRIDA sebagai penyelenggara Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian,

pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB dalam lima tahun mendatang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BRIDA Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (8-283/2024));
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 45);
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 77);
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi NTB. (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 11);

26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis BRIDA Provinsi NTB dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berbasis pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis daerah. Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan strategis yang terukur dan berbasis data, mengintegrasikan serta mensinergikan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu, Dokumen Renstra ini juga berfungsi untuk mendukung implementasi pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya dokumen ini, BRIDA Provinsi NTB dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur serta sumberdaya (kepegawaian, dan sarana dan prasarana), kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan, kerja sama dengan mitra pembangunan dan permasalahan beserta isu strategis BRIDA Provinsi NTB.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BRIDA Provinsi NTB berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dan cascading kinerja mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, serta indikatornya.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan tentang program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BRIDA Provinsi NTB serta penjabaran bentuk intervensi BRIDA Provinsi NTB terhadap program unggulan, kegiatan strategis dan program prioritas.

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan BRIDA**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, melalui struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan satu Subag Umum dan Kepegawian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. BRIDA memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan riset dan inovasi di tingkat daerah.

Pelayanan yang diberikan oleh BRIDA mencakup beberapa aspek utama:

1. Peningkatan Pelayanan Publik: BRIDA bertujuan untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pengembangan teknologi tepat guna di daerah.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi: BRIDA berfungsi untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pengembangan riset dan inovasi di daerah. Hal ini termasuk penyusunan perencanaan, program, dan anggaran yang terkait dengan riset dan inovasi.
3. Fasilitasi dan Pembinaan: BRIDA juga bertugas memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Melakukan pembinaan dan fasilitasi BRIDA dan unit litbang pemerintah Kabupaten/Kota, menjadi pusat pengembangan riset untuk mendukung UMKM dan sektor ekonomi produktif lainnya serta menjadi pusat diseminasi dan peragaan iptek di daerah.
4. Prinsip Pelayanan: Dalam pelayanannya, BRIDA menerapkan prinsip tepat waktu, sederhana, dan terjangkau, dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi dan media sosial untuk mempermudah akses masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya BRIDA menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang

- memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
  6. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya;
  7. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi;
  8. Pelaksanaan administrasi badan;
  9. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### 2.1.1 Capaian Kinerja BRIDA

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), termasuk pengintegrasian BRIDA sebagai bagian dari struktur organisasi BRIN. BRIDA bertugas membantu pelaksanaan riset dan inovasi di tingkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan, Nomenklatur, dan Tugas BRIDA di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. BRIDA

bertanggung jawab untuk mendukung kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan berbasis riset dan inovasi. BRIDA memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Berikut adalah beberapa peran strategisnya:

1. Katalisator Pembangunan Daerah: BRIDA berfungsi sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan hasil riset, BRIDA membantu menghasilkan solusi nyata untuk berbagai tantangan pembangunan.
2. Peningkatan Efisiensi Kebijakan: BRIDA mendukung pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
3. Kolaborasi Lintas Sektor: BRIDA menjembatani kerja sama antara pemerintah daerah, akademisi, industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.
4. Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi: BRIDA juga berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat melalui riset dan inovasi.
5. Transformasi Birokrasi: BRIDA membantu memotong proses birokrasi yang panjang dengan menciptakan inovasi yang meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Berdasarkan data Tabel 2.1 berikut, diketahui capaian kinerja BRIDA Provinsi NTB menunjukkan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sudah sangat optimal sehingga target kinerja dapat seluruhnya tercapai. Gambaran capaian kinerja BRIDA Provinsi NTB selama 3 tahun terakhir berdasarkan RPJMD Tahun 2022-2023 dan Renstra 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan BRIDA Provinsi NTB Tahun 2022-2024

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	75	68,51	76	75,37	77	63,4
2	Jumlah Kajian Kelitbangan	Dokumen	7	7	16	16	9	9

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	Jumlah Penerima Beasiswa LN	Orang	136	136	32	32	24	24
4	Jumlah Penerima Beasiswa DN	Orang	2.137	2.137	2.452	2.452	1.042	1.042
5	Jumlah Ijin Penelitian	Ijin	1.500	1.468	1.500	2.058	1.500	2.582
6	Standarisasi Prototipe	Buah	10	10	5	5	8	8
7	Standarisasi Profesi	Orang	16	16	27	27	10	10
8	Jumlah PKS	Perjanjian	19	42	24	65	10	56
9	Jumlah Mitra	Mitra	19	19	24	24	10	18
10	Jumlah Tenant	Wirausaha	12	11	14	27	14	14
11	Jumlah Pengunjung Eduwisata	Orang	3.000	4.124	4.000	11.093	4.000	9.649
12	Jumlah Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi melalui Pertemuan	Kali/ Dokumen	4	4	4	4	1	1
13	Jumlah Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi melalui Media Sosial	Judul	0	0	0	0	48	34

Pada tahun 2024, acuan yang digunakan dalam merumuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BRIDA Provinsi NTB merujuk pada dokumen RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra BRIDA 2024-2026 menjadi dokumen antara sebelum disahkan RPJMD 2025-2029 yang terbaru maka indikator yang digunakan antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.2. Capaian IKU Pelayanan BRIDA Provinsi NTB Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL		TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			2021	2022	TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
1	Persentase Peningkatan Penerima Beasiswa NTB	%	93,45	32,77	15%	9,28%	61,87%	15%	-57%	-380%
		orang	1.712	2.273	2.614	2.484		2.857	1.066	
2	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Telah Diadopsi dan Diterapkan dalam Skala Industri	unit	N/A	13	20-25	20*	100,00	25-50	85	170,00

Capaian pada tahun 2023 dan 2024 cenderung menurun karena kebijakan penganggaran untuk Program Beasiswa tidak sebesar pada periode pembangunan 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada lagi pengiriman baru untuk beasiswa ke luar negeri. Anggaran yang ada hanya diperuntukkan untuk membiayai para *awardee on going* yang sedang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Adapun indikator jumlah inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pelayanan BRIDA Tahun 2024

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN	TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	77	63,4
2	Jumlah Kajian Kelitbangan	Dokumen	9	9
3	Jumlah Penerima Beasiswa LN	Orang	24	24
4	Jumlah Penerima Beasiswa DN	Orang	1042	1042
5	Jumlah Ijin Penelitian	Ijin	1500	2582
6	Standarisasi Prototipe	Buah	8	8
7	Standarisasi Profesi	Orang	10	10
8	Jumlah PKS	Perjanjian	10	56
9	Jumlah Mitra	Mitra	10	18
10	Jumlah Tenant	Wirausaha	14	14
11	Jumlah Pengunjung Eduwisata	Orang	4.000	9.649
12	Jumlah Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi melalui Pertemuan	Kali/ Dokumen	1	1
13	Jumlah Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi melalui Media Sosial	Judul	48	34

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pelayanan BRIDA Provinsi NTB Tahun 2022-2024

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.293.817.055	7.036.746.165	84,84	1.257.070.890	10.436.062.474	8.660.752.248	82,99	1.775.310.226	9.086.807.055	8.541.811.696	94,00	544.995.359
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	64.439.300	58.784.300	91,22	5.655.000	80.360.100	51.668.000	64,30	28.692.100
5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					20.800.000	18.697.200	89,89	2.102.800	32.938.500	30.682.500	93,15	2.256.000
5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					19.480.000	9.480.000	100,00	-	19.600.000	7.398.500	37,75	12.201.500
5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					16.159.300	16.159.300	100,00	-				
5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4.000.000	2.000.000	50,00	2.000.000	17.469.600	4.629.500	26,50	12.840.100
5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000	2.447.800	61,20	1.552.200	10.352.000	8.957.500	86,53	1.394.500

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.707.126.930</b>	<b>3.667.777.195</b>	<b>77,92</b>	<b>1.039.349.735</b>	<b>5.062.188.834</b>	<b>4.227.622.356</b>	<b>83,51</b>	<b>834.566.478</b>	<b>4.838.907.005</b>	<b>4.532.421.835</b>	<b>93,67</b>	<b>306.485.170</b>
5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.704.907.030	3.665.557.295	77,91	1.039.349.735	5.039.620.834	4.206.054.356	83,46	833.566.478	4.758.631.905	4.469.069.735	93,92	289.562.170
5.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.219.900	2.219.900	100,00	-	22.568.000	21.568.000	95,57	1.000.000	43.260.000	38.950.000	90,04	4.310.000
5.05.01.1.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									37.015.100	24.402.100	65,92	12.613.000
<b>5.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.860.000</b>	<b>99,00</b>	<b>140.000</b>	<b>7.381.700</b>	<b>6.671.700</b>	<b>90,38</b>	<b>710.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.190.000</b>	<b>99,23</b>	<b>110.000</b>
5.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.860.000	93,00	140.000	4.675.300	3.965.300	84,81	710.000	14.300.000	14.190.000	99,23	110.000
5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00	-	2.706.400	2.706.400	100,00	-				

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.125.000</b>	<b>22.125.000</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-	<b>30.003.500</b>	<b>23.417.669</b>	<b>78,05</b>	<b>6.585.831</b>
5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.125.000	22.125.000	100,00	-					30.003.500	23.417.669	78,05	6.585.831
<b>5.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>684.806.400</b>	<b>677.400.902</b>	<b>98,92</b>	<b>7.405.498</b>	<b>1.346.390.040</b>	<b>949.339.419</b>	<b>70,51</b>	<b>397.050.621</b>	<b>729.032.450</b>	<b>686.510.239</b>	<b>94,17</b>	<b>42.522.211</b>
5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.175.000	12.175.000	100,00	-	50.472.000	44.172.000	87,52	6.300.000	14.897.100	14.897.100	100,00	-
5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	-	16.441.750	16.441.750	100,00	-	6.485.000	6.010.000	92,68	475.000
5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.544.900	12.361.800	91,27	1.183.100	25.318.090	25.318.090	100,00	-				
5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.027.700	20.009.500	99,91	18.200	30.459.600	30.406.932	99,83	52.668				
5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.609.000	12.609.000	100,00	-	29.573.000	27.292.000	92,29	2.281.000	63.190.550	54.283.750	85,90	8.906.800

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.949.800	18.949.800	100,00	-	22.425.600	21.425.600	95,54	1.000.000	11.750.000	11.750.000	100,00	-
5.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.500.000	66.378.000	91,56	6.122.000	102.000.000	48.222.950	47,28	53.777.050	123.000.000	114.965.706	93,47	8.034.294
5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	249.999.236	100,00	764	568.100.000	275.232.197	48,45	292.867.803	421.126.800	420.569.177	99,87	557.623
5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	270.000.000	269.918.566	99,97	81.434	501.600.000	460.827.900	91,87	40.772.100	88.583.000	64.034.506	72,29	24.548.494
<b>5.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>113.522.000</b>	<b>110.212.000</b>	<b>97,08</b>	<b>3.310.000</b>	<b>324.956.300</b>	<b>252.871.000</b>	<b>77,82</b>	<b>72.085.300</b>	<b>597.096.000</b>	<b>570.462.000</b>	<b>95,54</b>	<b>26.634.000</b>
5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.862.000	19.500.000	98,18	362.000	7.500.000	7.250.000	96,67	250.000
5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.522.000	110.212.000	97,08	3.310.000	145.051.000	84.806.000	58,47	60.245.000	455.456.000	449.668.000	98,73	5.788.000

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.01.1.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					160.043.300	148.565.000	92,83	11.478.300	134.140.000	113.544.000	84,65	20.596.000
<b>5.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.621.021.725</b>	<b>2.414.434.958</b>	<b>92,12</b>	<b>206.586.767</b>	<b>2.955.184.300</b>	<b>2.819.547.952</b>	<b>95,41</b>	<b>135.636.348</b>	<b>2.462.448.000</b>	<b>2.367.251.836</b>	<b>96,13</b>	<b>95.196.164</b>
5.05.01.1.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461.421.725	357.734.958	77,53	103.686.767	549.501.100	452.587.952	82,36	96.913.148	226.800.000	174.484.836	76,93	52.315.164
5.05.01.1.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.159.600.000	2.056.700.000	95,24	102.900.000	2.405.683.200	2.366.960.000	98,39	38.723.200	2.235.648.000	2.192.767.000	98,08	42.881.000
<b>5.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.215.000</b>	<b>130.936.110</b>	<b>99,79</b>	<b>278.890</b>	<b>675.522.000</b>	<b>345.915.521</b>	<b>51,21</b>	<b>329.606.479</b>	<b>334.660.000</b>	<b>295.890.117</b>	<b>88,42</b>	<b>38.769.883</b>

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000	71.999.610	100,00	390	108.000.000	107.998.630	100,00	1.370	158.000.000	134.219.117	84,95	23.780.883
5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.685.000	34.406.500	99,20	278.500	28.250.000	19.799.891	70,09	8.450.109				
5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.530.000	24.530.000	100,00	-	539.272.000	218.117.000	40,45	321.155.000	176.660.000	161.671.000	91,52	14.989.000
<b>5.05.02</b>	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	<b>35.790.783.900</b>	<b>30.853.605.344</b>		<b>4.937.178.556</b>	<b>35.683.174.300</b>	<b>30.554.485.989</b>		<b>5.128.688.311</b>	<b>12.808.831.200</b>	<b>11.673.012.578</b>	<b>91,13</b>	<b>1.135.818.622</b>
<b>5.05.02.1.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>939.026.800</b>	<b>915.714.234</b>	<b>97,52</b>	<b>23.312.566</b>	<b>821.000.000</b>	<b>802.661.940</b>	<b>97,77</b>	<b>18.338.060</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.755.706</b>	<b>99,65</b>	<b>244.294</b>
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	75.375.000	74.794.000	99,23	581.000	721.000.000	707.443.979	98,12	13.556.021	70.000.000	69.755.706	99,65	244.294

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	439.141.800	423.064.287	96,34	16.077.513	100.000.000	95.217.961	95,22	4.782.039				
5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	424.510.000	417.855.947	98,43	6.654.053								
<b>5.05.02.1.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>34.209.720.100</b>	<b>29.348.112.515</b>	<b>85,79</b>	<b>4.861.607.585</b>	<b>33.348.167.300</b>	<b>28.467.726.581</b>	<b>85,37</b>	<b>4.880.440.719</b>	<b>12.305.326.200</b>	<b>11.188.431.848</b>	<b>90,92</b>	<b>1.116.894.352</b>
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	529.001.000	527.713.400	99,76	1.287.600	968.790.000	914.522.204	94,40	54.267.796	1.362.080.200	1.354.725.745	99,46	7.354.455
5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	33.473.002.600	28.617.636.173	85,49	4.855.366.427	31.986.103.500	27.296.397.035	85,34	4.689.706.465	10.776.251.000	9.669.811.023	89,73	1.106.439.977
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	89.430.500	86.648.282	96,89	2.782.218	160.000.000	110.145.022	68,84	49.854.978	65.000.000	64.849.080	99,77	150.920
5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	118.286.000	116.114.660	98,16	2.171.340	233.273.800	146.662.320	62,87	86.611.480	101.995.000	99.046.000	97,11	2.949.000

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>5.05.02.1.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>427.400.000</b>	<b>390.304.600</b>	<b>91,32</b>	<b>37.095.400</b>	<b>919.000.000</b>	<b>903.730.211</b>	<b>98,34</b>	<b>15.269.789</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.410.222</b>	<b>99,61</b>	<b>589.778</b>
5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	137.310.000	136.322.000	99,28	988.000	185.000.000	183.709.506	99,30	1.290.494	65.000.000	64.413.185	99,10	586.815
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	206.030.000	170.355.600	82,68	35.674.400	185.000.000	175.190.005	94,70	9.809.995	85.000.000	84.997.037	100,00	2.963
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	84.060.000	83.627.000	99,48	433.000	549.000.000	544.830.700	99,24	4.169.300				
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>214.637.000</b>	<b>199.473.995</b>	<b>92,94</b>	<b>15.163.005</b>	<b>595.007.000</b>	<b>380.367.257</b>	<b>63,93</b>	<b>214.639.743</b>	<b>283.505.000</b>	<b>265.414.802</b>	<b>93,62</b>	<b>18.090.198</b>
5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	107.181.500	101.900.095	95,07	5.281.405	335.007.000	212.931.957	63,56	122.075.043	143.590.000	129.354.122	90,09	14.235.878

Kode Rekening	Uraian	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Real. Keu (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	107.455.500	97.573.900	90,80	9.881.600	210.000.000	127.357.460	60,65	82.642.540	115.000.000	114.664.680	99,71	335.320
						50.000.000	40.077.840	80,16	9.922.160	24.915.000	21.396.000	85,88	3.519.000
		<b>44.084.600.955</b>	<b>37.890.351.509</b>	<b>85,95</b>	<b>6.194.249.446</b>	<b>46.119.236.774</b>	<b>39.215.238.237</b>	<b>85,03</b>	<b>6.903.998.537</b>	<b>21.895.638.255</b>	<b>20.214.824.274</b>	<b>92,32</b>	<b>1.680.813.981</b>

### 2.1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BRIDA Provinsi NTB

Seiring dengan perubahan regulasi yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan isu-isu strategis pembangunan Daerah, di antaranya adalah regulasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian tugas dan fungsi BRIDA Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 disajikan berikut ini.

#### **Kepala BRIDA**

##### A. Ringkasan Tugas

Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

##### B. Uraian Tugas

- a. Merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan strategis dan teknis serta pembinaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

- b. Merumuskan bahan kebijakan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- c. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- d. Merumuskan bahan kebijakan dan rencana alokasi penganggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- e. Mendukung perumusan bahan kebijakan dan menyusun anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- f. Merumuskan bahan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan

- peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- g. Merumuskan bahan kebijakan dalam mendukung pengembangan potensi unggulan daerah melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
  - h. Merumuskan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi umum dalam pelayanan publik terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
  - i. Merumuskan kerangka regulasi dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
  - j. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
  - k. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan

pengelolaan kekayaan intelektual;

- l. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan dan penelitian pengembangan;
- m. Menyelenggarakan riset dan inovasi secara mandiri maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha dan Masyarakat;
- n. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang riset dan inovasi serta kekayaan intelektual sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan informasi geospasial dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun lembaga terkait lainnya;
- p. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LKjIP/LAKIP, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;
- q. Merumuskan konsep koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- r. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- t. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

### C. Uraian Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

## **Sekretaris BRIDA**

### **A. Ringkasan Tugas**

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.

### **B. Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan program, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam bentuk rencana kerja, penganggaran, dan evaluasi kinerja, menyiapkan bahan kebijakan administrasi umum dan Kepegawaian, serta administrasi keuangan pada BRIDA Provinsi NTB;
- c. Melaksanakan, koordinasi dan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;

- d. Menyusun bahan kebijakan rencana pengembangan potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- e. Menyusun bahan kebijakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
- f. Menyusun bahan evaluasi, pemantauan dan pengendalian atas capaian pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- g. Mengoordinasikan dan menyusun rencana, program/kegiatan dan anggaran BRIDA sesuai pedoman kerja dan indikator kinerja;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BRIDA Provinsi NTB;
- i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- j. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;
- k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan;
- l. Menyusun konsep koordinasi, pembinaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

### C. Uraian Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh

- sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi;
- c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
  - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **A. Ringkasan Tugas**

Melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

### **B. Rincian Tugas**

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan aset/barang daerah serta urusan rumah tangga Badan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
- d. Menyiapkan bahan kebijakan rencana pengembangan potensi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Unsur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (1 Subbagian Umum dan Kepegawaian) dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 2.1.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional (JF) pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

1. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
5. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah.

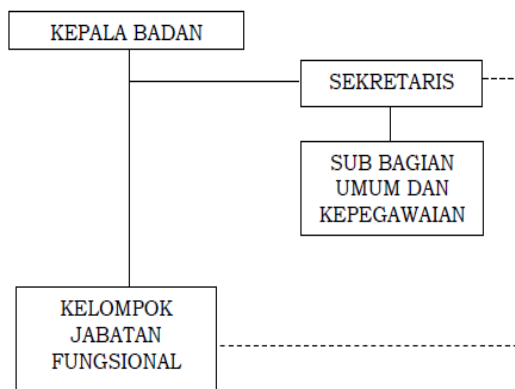
1. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah

- di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerjasama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
  4. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
  5. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  6. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BRIDA Tahun 2024

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 11 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



### 2.1.3 Sumber Daya BRIDA

Ketersediaan SDM yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam jumlah, kompetensi, dan pemerataan SDM, serta belum optimalnya fasilitas penunjang seperti teknologi dan infrastruktur kerja. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan, keterlambatan proses kerja, dan belum maksimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penguatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang sesuai kebutuhan.

#### 2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) berperan dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini jumlah Pegawai/SDM BRIDA Provinsi NTB sebanyak 107 orang terdiri dari 33 ASN dan 74 orang Non ASN (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian Tahun 2024

No	Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		
		PNS (Orang)	PPPK (Orang)	Non PNS (Orang)
1	Magister (S2)	7		6
2	Sarjana (S1/D4)	19	1	26
3	Diploma (D3, D2, D1)	1		3
4	SLTA	4		35
5	Sekolah Dasar			1
	<b>Jumlah &gt;&gt;&gt;</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
	<b>Total &gt;&gt;&gt;</b>	<b>103</b>		

Kualitas SDM BRIDA berdasarkan tingkat pendidikan sangat memadai. Pegawai ASN dan Non ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 46 orang, Diploma 4 orang dan jenjang SLTA ke bawah sebanyak 39 orang. Pegawai BRIDA Provinsi NTB terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 23 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang. Dengan jumlah dan komposisi SDM yang tersedia, para pegawai diharapkan mampu untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif serta perubahan positif bagi organisasi.

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun organisasi dan lembaga lainnya dan salah satu upaya peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah dengan melaksanakan pendidikan non formal berupa pendidikan fungsional, struktural dan jabatan dan diklat-diklat teknis tematik lainnya. Pendidikan dan pelatihan terutama diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas bagi ASN dan Non ASN lingkup BRIDA Provinsi NTB.

Tabel 2.6 Jumlah ASN BRIDA Provinsi NTB berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
4.	Pembina (IV/a)	1
5.	Penata Tk I (III/d)	12
6.	Penata (III/c)	3
7.	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
8.	Penata Muda (III/a)	2
9.	Pengatur Tk. I (II/d)	2
10.	Pengatur (II/c)	1
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
12.	Pengatur Muda (II/a)	
13	IX ( PPPK )	1
	<b>Total Jumlah &gt;&gt;&gt;</b>	<b>32</b>

Tabel 2.7 Jumlah Fungsional ASN BRIDA Provinsi NTB berdasarkan Jenjang Tahun 2024

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah
1.	Jabatan Fungsional Perencana	Madya	1
		Muda	3
2.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Madya	1
3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Madya	2
		Muda	2
4.	Jabatan Fungsional Arsiparis	Muda	2
	<b>Total Jumlah &gt;&gt;&gt;</b>		<b>11</b>

### 2.1.3.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang keberhasilan BRIDA Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai BRIDA Provinsi NTB menempati gedung kantor dua lantai yang berdiri di atas lahan seluas 261.202 m<sup>2</sup>. Kantor BRIDA Provinsi NTB dilengkapi dengan 1 (satu) ruang rapat berkapasitas 20 sampai 100 orang dengan fasilitas audio visual dan proyektor untuk memudahkan koordinasi dengan instansi dan stakeholder lainnya, sebuah mushola, dan 7 kamar mandi, 10 unit komputer PC dan 10 laptop, 10 unit printer serta jaringan internet yang bisa diakses pada setiap ruangan. Selain itu, juga terdapat kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit yang digunakan oleh pegawai BRIDA sebagai sarana transportasi dalam menjalankan tugas kantor. Berdasarkan data Per 1 Januari 2024, aset yang masih operasional dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Aset BRIDA Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2024

No	Jenis Infrastruktur	Status	Jumlah	Stn	Keterangan/Manfaat
1.	Gedung Manufaktur1 (M-1)	Milik BRIDA	2.990,00	m <sup>2</sup>	Gedung Workshop Layanan Jasa Tenant IKM dan Kantor BRIDA
2.	Pabrik Corn Seed, Corn Drayer dan Feedmill:				
	a. Gedung Corn Seed, dilengkapi Peralatan dan Mesin Corn Seed	Milik BRIDA	1.116,00	m <sup>2</sup>	Proses menjalin Investor sebagai Mitra BRIDA
	b. Gedung Corn Drayer, dilengkapi Peralatan dan Mesin Corn Drayer	Milik BRIDA	500,11	m <sup>2</sup>	Proses menjalin Investor sebagai Mitra BRIDA
	c. Gedung Feedmill, dilengkapi Peralatan dan Mesin Feedmill	Milik BRIDA	482,56	m <sup>2</sup>	Proses menjalin Investor sebagai Mitra BRIDA
	d. Kantor Corn Seed, Corn Drayer & Feedmill	Milik BRIDA	258,64	m <sup>2</sup>	Proses menjalin Investor sebagai Mitra BRIDA
3.	Gedung Pengolahan Kosmetik	Milik BRIDA	466,26	m <sup>2</sup>	Pembuatan Kosmetik & Black Garlic (oleh PT. Karya Iwin Insani sebagai Tenant BRIDA)
4.	Gedung Workshop Pabrikasi	Milik BRIDA	530,10	m <sup>2</sup>	Ada 3 unit, Hibah dari Mitra, belum digunakan
5.	Gedung Pabrik Workshop Mini	Milik BRIDA	159,12	m <sup>2</sup>	Belum diserahkan ke BRIDA, belum digunakan
6.	Gedung Meeting Point	Milik BRIDA	200,00	m <sup>2</sup>	Belum diserahkan ke BRIDA, belum digunakan
7.	Musholla dan Toilet	Milik BRIDA	117,00	m <sup>2</sup>	Belum diserahkan ke BRIDA, belum digunakan

No	Jenis Infrastruktur	Status	Jumlah	Stn	Keterangan/Manfaat
8.	Gedung PUSPAIPTEKDA	Milik BRIDA	86,92	m <sup>2</sup>	Belum diserahkan ke BRIDA, sudah digunakan
9.	Gedung Black Larva Soldier Fly	Milik PT.BGL	61,87	m <sup>2</sup>	Usaha Magot/BSF (oleh PT. BGL, Tenant BRIDA)
10.	Gedung Pengolahan Logam (Spandek), lengkap alat dan mesin Spandek	Milik Al-Ansar Bina Indomas	723,31	m <sup>2</sup>	Pabrik Logam (Spandek) dan KantorPabrik Logam (Mitra BRIDA)
11.	Bangunan Kandang Ayam	Milik Heri Susanto	1.348,20	m <sup>2</sup>	Ada 3 unit, Usaha Ternak Ayam Petelur (Mitra BRIDA)
12.	Bangunan Gedung Kantor Ayam Petelur	Milik Heri Susanto	71,76	m <sup>2</sup>	Kantor Ternak Ayam Petelur (Mitra BRIDA)
13.	Bangunan Gedung Telur	Milik Dis-Nakeswn	150,72	m <sup>2</sup>	Gudang penyimpan telur ayam (Mitra BRIDA)
14.	Bangunan Gedung Penetasan Telur	Milik Dis-Nakeswn	140,90	m <sup>2</sup>	Tempat penetasan telurayam (Mitra BRIDA)
15.	Bangunan Rumah Teknologi Tahan Gempa	MilikMitra BRIDA	147,96	m <sup>2</sup>	Ada 3 unit, sudah digunakan
16.	Bangunan Gedung Pengolah Kopi	Milik PT. Bank NTB Syariah	982,71	m <sup>2</sup>	Belum digunakan (Mitra BRIDA)
17.	Bangunan Gedung Pabrik Bata Ringan	Milik PT.TLL	1.114,00	m <sup>2</sup>	Belum digunakan (Mitra BRIDA)
18.	Bangunan Green Houses	Milik Bokah Farm	152,59	m <sup>2</sup>	UT Sayuran Hidroponik (Mitra BRIDA)

Sumber: Sub Bagian Umum BRIDA Provinsi NTB, 2024

#### 2.1.4 Kinerja Pelayanan BRIDA

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Secara kelembagaan bertanggung jawab merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai perwujudan Visi Misi Pemerintah NTB dilakukan melalui berbagai jenis pelayanan dan kelompok sasaran berdasarkan program unggulan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

Table 2.9 Kinerja Pelayanan BRIDA Provinsi NTB

No.	Tim Kerja	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Internal (urusan dalam) lingkup BRIDA, seperti: Administrasi Pelayanan Surat Menyurat, Data, Informasi Publik, Rencana Kerja, Anggaran, Pengelolaan Aset, Keuangan, SDM Aparatur/kepegawaian dan Evaluasi Internal BRIDA</li> <li>2. Pelayanan Publik (urusan keluar).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karyawan lingkup BRIDA</li> <li>2. OPD Terkait</li> <li>3. Pemerintah/ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>4. Perguruan Tinggi</li> <li>5. Lembaga Riset</li> <li>6. NGO</li> <li>7. Dunia Usaha</li> <li>8. Mahasiswa/ Pelajar</li> <li>9. Masyarakat Umum</li> </ol>
2	POKJA-POKJA: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. POKJA RISET BIDANG PEMERINTAHAN &amp; PENGKAJIAN PERATURAN</li> <li>2. POKJA RISET BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</li> <li>3. POKJA RISET BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</li> <li>4. POKJA INOVASI HILIRISASI DAN KEMITRAAN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.</li> <li>2. Melakukan/Fasilitasi Kajian/Riset yang Mendukung Visi Misi, Program/Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Melaksanakan Fasilitas Pengkajian, Inovasi, Inovasi, Pengembangan Prototype Teknologi di Daerah.</li> <li>4. Melaksanakan/fasilitasi Standarisasi Prototype Produk/Teknologi Hasil Riset.</li> <li>5. Melaksanakan/Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual.</li> <li>6. Melaksanakan Sosialisasi Hasil Riset dan Inovasi.</li> <li>7. Melaksanakan Fasilitas Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Stakeholder lainnya.</li> <li>8. Melaksanakan fasilitas Pengembangan/ Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.</li> <li>9. Melaksanakan Fasilitas Kajian/Riset Pemanfaatan Data Geospasial.</li> <li>10. Melaksanakan Fasilitas Ijin Penelitian.</li> <li>11. Fasilitas Kunjungan/Eduwisata Ilmiah.</li> <li>12. Melaksanakan tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Pimpinan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD Terkait</li> <li>2. Pemerintah/ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>3. Perguruan Tinggi</li> <li>4. Lembaga Riset</li> <li>5. NGO</li> <li>6. Dunia Usaha</li> <li>7. Mahasiswa/ Pelajar</li> <li>8. Masyarakat Umum</li> </ol>
3	Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitas, Dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan, Di Daerah Yang Memperkuat Fungsi Dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagai Landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Nilai Pancasila;</li> <li>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD Terkait</li> <li>2. Pemerintah/ Pemerintah Kab/Kota</li> <li>3. Perguruan Tinggi</li> <li>4. Lembaga Riset</li> <li>5. NGO</li> <li>6. Dunia Usaha</li> <li>7. Mahasiswa/ Pelajar</li> <li>8. Masyarakat Umum</li> </ol>

No.	Tim Kerja	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
		<p>Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengembangan Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi di Daerah;</p> <p>3. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, Kerjasama Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;</p> <p>4. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;</p> <p>5. Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;</p> <p>6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Badan.</p>	
4.	Kelompok JF Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah	<p>1. Pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi di Daerah yang Memperkuat Fungsi dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagai Landasan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Nilai Pancasila;</p> <p>2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Inovasi dan Inovasi, Kerjasama Inovasi dan Inovasi, Serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi di Daerah;</p> <p>3. Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Inovasi dan Inovasi, Kerjasama Inovasi dan Inovasi, Serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi di Daerah;</p> <p>4. Pemantauan dan Evaluasi Inovasi dan Inovasi di Daerah;</p> <p>5. Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah</p> <p>6. Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat /Organisasi Penelitian Lainnya di Daerah</p> <p>7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Badan</p>	<p>1. OPD Terkait</p> <p>2. Pemerintah/ Pemerintah Kab/Kota</p> <p>3. Perguruan Tinggi</p> <p>4. Lembaga Riset</p> <p>5. NGO</p> <p>6. Dunia Usaha</p> <p>7. Mahasiswa/ Pelajar</p> <p>8. Masyarakat Umum</p>

### 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Riset dan Inovasi Daerah memberikan pelayanan kepada Gubernur berupa rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil dari kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian dan pengkajian aktual, pengembangan, perekayasaan, *policy brief* yang mulai dikembangkan sebagai respon tuntutan Gubernur dalam pemenuhan *quick research*), inovasi dan teknologi. Selain itu BRIDA juga memberikan layanan kepada Perangkat Daerah, mitra dan stakeholder lainnya dalam bentuk:

1. Pembinaan fungsional dan konsultasi tentang penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan daerah;
2. Pemberikan rekomendasi menunjang penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah;
3. Memberikan layanan pendampingan terkait hak kekayaan intelektual;
4. Memberikan layanan fasilitasi ijin penelitian;
5. Memberikan layanan fasilitasi magang, kunjungan belajar/eduwisata pendidikan dan ilmiah; dan
6. Memberikan pembinaan dan fasilitasi inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat maupun daerah.

Selain pelayanan tersebut, BRIDA Provinsi NTB juga memberikan informasi melalui diseminasi/publikasi hasil kelitbangan melalui:

1. Pameran hasil kelitbangan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
2. Penyebaran informasi melalui Website BRIDA Provinsi Nusa Tenggara Barat <http://www.brida.ntbprov.go.id>. Dan juga melalui sosial media instagram @brida\_ntb youtube Brida Nusa Tenggara Barat.

Kelompok sasaran layanan BRIDA adalah seluruh perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 41 Perangkat Daerah (termasuk 9 Biro pada Sekretariat Daerah), dan juga lembaga mitra lainnya yang sudah menjalin kerjasama, NGO, Perguruan Tinggi, masyarakat umum dan stakeholder lainnya.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BRIDA**

BRIDA dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan riset dan ekosistem inovasi untuk mendukung proses pembangunan di daerah. Hasil riset seyogyanya menjadi awal dalam proses pembangunan dimana semua kebijakan yang akan ditempuh seharusnya sudah melalui proses kajian yang mendalam sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan riset (*research based policy*) dan berbasis bukti (*evidence based policy*) akan dikerjakan dapat menjawab permasalahan daerah. Saat ini riset dan inovasi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dari proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang mengakibatkan belum optimalnya hasil pembangunan. Oleh karena itu daerah perlu memprioritaskan kegiatan riset dalam semua sektor untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan BRIDA**

Permasalahan pelayanan terkait dengan fungsi BRIDA Provinsi NTB sebagai bentuk uraian tugas masih belum berjalan dengan baik. Permasalahan terkait fungsi tersebut diantaranya adalah berikut:

1. BRIDA belum memiliki Rencana Induk Kelitbangan dan Peta Jalan Pemajuan Iptek yang berfungsi sebagai acuan rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akibatnya kegiatan kelitbangan yang dilakukan kurang terarah. Melalui inventarisasi permasalahan dan rapat koordinasi dengan perangkat daerah provinsi, BRIDA dapat merumuskan rencana induk kelitbangan untuk merespon kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi.
2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintahan Provinsi dari pelaksanaan hingga implementasinya belum berjalan dengan baik. Seharusnya kegiatan kelitbangan dirumuskan bersama dengan tim yang melibatkan PD terkait sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan bisa tuntas dan dapat dieksekusi dan diimplementasikan oleh PD yang berkepentingan.
3. Permasalahan sumber daya manusia kelitbangan adalah keterbatasan jenis jabatan fungsional keahlian dan terbatasnya bidang kepakaran jabatan fungsional peneliti yang ada. Kegiatan kelitbangan harus didukung oleh berbagai jenis jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan

- Iptek, Analisis Kebijakan, Teknisi Litkayasa dan jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kelitbangan .
4. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan inovasi daerah yang dilakukan oleh BRIDA belum optimal. BRIDA menghimpun dan mengembangkan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, Perangkat Daerah, dan Perguruan Tinggi.
  5. Regulasi tentang penyelenggaraan kelitbangan di daerah/Provinsi belum memiliki dasar hukum yang kuat minimal setingkat Peraturan Gubernur. Hal ini merupakan kendala bagi Perangkat Daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan kelitbangannya, terutama yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan. Akibatnya beberapa Perangkat Daerah belum memanfaatkan hasil kelitbangan BRIDA.
  6. Kerjasama/kemitraan jejaring riset dan inovasi daerah dalam rangka replikasi riset dan inovasi lintas sektor, antar daerah masih kurang sehingga sinergitas antar stakeholder terhadap pelaksanaan inovasi daerah perlu di tingkatkan.
  7. Kapasitas infrastruktur pendukung riset, inovasi dan pengembangan iptek yang belum memadai dimana secara infrastuktur sarana dan prasarana yang dimiliki BRIDA masih terbatas.
  8. Publikasi dan penyebarluasan informasi hasil riset inovasi dan pemanfaatan iptek yang terimplementasi di daerah masih rendah.

### 2.2.2 Isu strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam rangka penentuan tujuan dan sasaran BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Tabel. 2.10 Isu Strategis Urusan Penelitian dan Pengembangan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Provinsi NTB memiliki Bonus demografi jumlah penduduk usia produktif (15– 64 tahun).</p> <p>2. Pertanian di Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dan variatif didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dan sebagai komponen penting dalam pembangunan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.</p> <p>3. Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau Besar yaitu Pulau</p>	<p>1. BRIDA belum memiliki Rencana Induk Kelitbangan dan Peta Jalan Pemajuan Iptek yang berfungsi sebagai acuan rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akibatnya kegiatan kelitbangan yang dilakukan belum fokus.</p> <p>2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintahan Provinsi dari pelaksanaan hingga implementasinya belum berjalan dengan baik.</p> <p>3. Permasalahan sumber daya manusia kelitbangan adalah keterbatasan jenis jabatan fungsional keahlian</p>	<p>1. Belum Optimalnya Konektivitas dan infrastruktur Dasar Wilayah</p> <p>2. Masih Rendahnya Taraf Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Masih Tingginya angka Pengangguran dan kurangnya Kualitas Tenaga Kerja</p> <p>4. Masih Rendahnya Kualitas maupun kuantitas Pendidikan</p> <p>5. Masih tingginya angka Kemiskinan</p> <p>6. Degradasi Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana</p> <p>7. Kurangnya Kepastian Hukum, serta lemahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</p> <p>8. Kurangnya Daya Saing Wilayah</p> <p>9. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan, Birokrasi dan belum optimalnya pelayanan publik</p>	<p>1. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar zaman kita. Dari pola cuaca yang bergeser dan mengancam produksi pangan, hingga naiknya permukaan laut yang meningkatkan risiko banjir besar, dampak perubahan iklim bersifat global dan sangat luas.</p> <p>2. Dunia masih jauh dari target untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) kedua, yaitu Tanpa Kelaparan pada 2030. Tingkat kelaparan global hampir tidak berubah selama tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya</p>	<p>1. <b>Transformasi Ekonomi</b>, Hilirisasi SDA belum optimal - Ekonomi daerah masih bergantung pada sektor tertentu - Kesenjangan infrastruktur antarwilayah - Ketahanan pangan–energi–air rapuh</p> <p>2. <b>Ketimpangan &amp; Kemiskinan</b>, Tingginya kemiskinan di beberapa provinsi (NTT, Papua, Maluku) - Kesenjangan sosial ekonomi antarwilayah</p> <p>3. <b>Kualitas SDM</b>, Produktivitas tenaga kerja rendah - Tingginya pengangguran lulusan SMA/SMK - IPM di bawah rata-rata nasional di beberapa daerah</p> <p>4. <b>Ketahanan Sosial, Budaya &amp; Politik</b>, Indeks</p>	<p><b>1. Pertumbuhan Ekonomi &amp; Diversifikasi</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan ekonomi melambat: dari <b>5,08% (2022) menjadi 4,0% (2023)</b></li> <li>Ketergantungan pada <b>pariwisata (Bali), pertanian (NTB &amp; NTT)</b>, dan belum optimalnya <b>hilirisasi/industri pengolahan</b> (kontribusi rendah: NTB 3,86%, NTT 1,31%)</li> <li>Kualitas pariwisata (Quality Tourism Index) di NTB dan NTT lebih rendah dibanding Bali dan nasional.</li> </ul> <p><b>2. Ketenagakerjaan &amp; Pengangguran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat <b>pengangguran terbuka (TPT)</b> lebih rendah dari</li> </ul>	<p>1. Ekosistem Riset untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di daerah belum terintegrasi dalam Tata kelola pemerintahan, dimana fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal pemanfaatannya.</p> <p>2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dan inovasi teknologi sebagai landasan dalam penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di daerah.</p> <p>3. Pembinaan, penumbuhan dan Pengelolaan Inovasi Daerah belum optimal.</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lombok dan Pulau Sumbawa, dan dikelilingi 401 pulau kecil dengan 32 pulau diantaranya berpenghuni dan Sebagian menjadi obyek pariwisata.</p> <p>4. Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki komoditas sumber daya mineral yang sangat besar antara lain; emas, perak bauksit, timah, pasir besi, batu bara, kalsium, dan mangan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah.</p> <p>5. Adanya kebijakan hilirisasi melalui pembangunan smelter yang memberikan dampak positif terhadap</p>	<p>dan terbatasnya bidang kepakaran jabatan fungsional Peneliti yang ada.</p> <p>4. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan inovasi daerah yang dilakukan oleh BRIDA belum optimal.</p> <p>5. Regulasi tentang penyelenggaraan kelitbangan di daerah/Provinsi belum memiliki dasar hukum yang kuat minimal setingkat Peraturan Gubernur.</p> <p>6. Kerjasama/ kemitraan jejaring riset dan inovasi daerah dalam rangka replikasi riset dan inovasi lintas sektor, antar daerah masih kurang.</p> <p>7. Kapasitas infrastruktur pendukung riset inovasi dan</p>	<p>(sumber, Dokumen KLHS RPJMD)</p>	<p>melonjak tajam akibat pandemi COVID-19.</p> <p>3. Sejak berdiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah aktif mendorong dan melindungi kesehatan masyarakat di seluruh dunia</p> <p>4. Kehidupan berawal dari lautan. Laut mencakup sekitar 72 persen permukaan bumi. Lautan tidak hanya menjadi sumber pangan utama sejak awal peradaban, tetapi juga menjadi jalur perdagangan, petualangan, dan penemuan sejak awal sejarah tertulis.</p> <p>5. Air tawar menopang kehidupan manusia dan sangat penting</p>	<p>Persepsi Korupsi menurun - Kohesi sosial dan moderasi beragama belum kuat - Demokrasi dan kapasitas lembaga politik belum merata</p> <p>5. <b>Lingkungan &amp; Ketahanan Iklim,</b> Deforestasi &amp; degradasi lingkungan - Kualitas lingkungan hidup rendah di daerah padat - Kerentanan tinggi terhadap bencana alam &amp; iklim ekstrem</p> <p>6. <b>Tata Kelola &amp; Data,</b> Kelemahan integrasi data pembangunan - Keterbatasan ruang fiskal (rasio pajak rendah) - Risiko keamanan siber &amp; privasi data</p> <p>(sumber, RPJMN 2025 – 2029)</p>	<p>nasional, namun justru tinggi pada <b>lulusan menengah-atas:</b> NTB: SMK 4,73%; NTT: SMA 5,66%; Bali: Diploma 3,4%</p> <p><b>3. Kemiskinan &amp; Struktur Pekerjaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesenjangan kesejahteraan: Bali: kemiskinan 4%; NTB: 12,91%; NTT: 19,48% (nasional 9,03%)</li> <li>Tingginya pekerja sektor informal: NTB 70,5%, NTT 73,3%, Bali 50,7% (nasional 57,9%).</li> <li>Pertanian menyerap tenaga kerja besar tetapi dengan <b>nilai tambah rendah</b> (NTB urutan ke-3 terendah, NTT ke-2 terendah nasional).</li> </ul> <p><b>4. SDM &amp; Kesehatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas SDM relatif rendah:</li> </ul>	<p>4. SDM, infrastruktur dan Sarpras pendukung Riset dan Inovasi di Daerah masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas.</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>peningkatan kinerja industri pengolahan khususnya sub sektor industri pengolahan logam dasar di NTB</p> <p>6. Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi listrik diantaranya panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari.</p> <p>7. Potensi perikanan di Provinsi NTB cukup menjanjikan bahkan salah satu komoditi ekspor unggulannya adalah ikan segar dan mutiara. Komoditas perikanan terbagi menjadi perikanan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, udang, dan</p>	<p>pengembangan iptek yang belum memadai dimana secara infrastuktur sarana dan prasarana yang dimiliki BRIDA masih terbatas.</p> <p>8. Publikasi dan penyebarluasan informasi hasil riset inovasi dan pemanfaatan iptek yang terimplementasi di daerah masih rendah.</p>		<p>bagi kesehatan. Sebenarnya, air bersih tersedia cukup untuk semua orang di bumi. Namun karena masalah ekonomi atau infrastruktur, jutaan orang, yang kebanyakan anak-anak, meninggal akibat penyakit yang berkaitan dengan kurangnya pasokan air, sanitasi, dan kebersihan.</p> <p>(sumber, UN Indonesia)</p>		<p><b>Prevalensi stunting</b> lebih tinggi dari nasional (NTB 19,9%, NTT 31%, nasional 18,3%). Rendahnya cakupan penemuan kasus TBC (NTB 52,6%, NTT 44,1%, Bali 50,2%, nasional 77,5%). Wilayah endemis rabies (KLB 2 tahun terakhir).</p> <p><b>5. Infrastruktur Dasar &amp; Layanan Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses <b>air minum layak</b> dan <b>sanitasi layak</b> di NTT masih rendah (air minum 88,3%, sanitasi 75,7%) dibanding nasional (91,7% dan 82,3%)</li> <li>Tingginya unmet need layanan kesehatan (NTB 8,24%, NTT 7,06%, nasional 5,18%).</li> </ul>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
lainnya. Untuk perikanan budidaya dengan komoditas rumput laut, lobster, kerapu, udang, bandeng, nila, lele, mas, gurami, dan lainnya  (sumber, Dokumen RPJMD Provinsi NTB)					(sumber, RPJMN 2025 – 2029)	

Isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi NTB sebagai berikut:

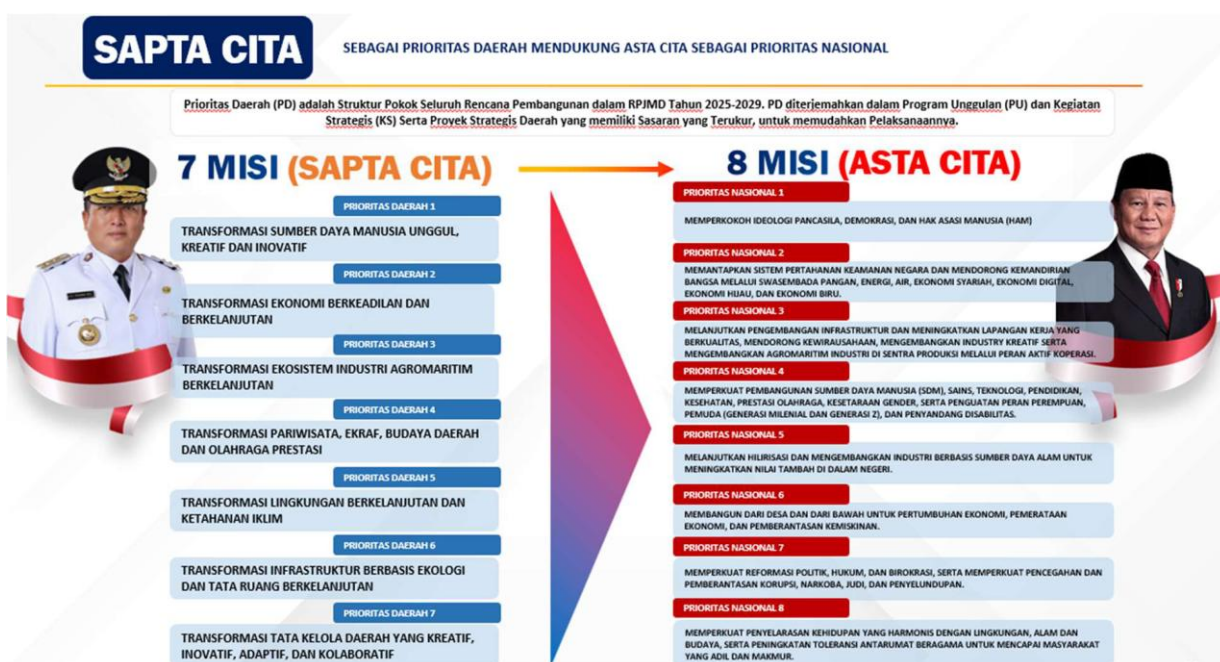
1. Ekosistem Riset untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis di daerah belum terintegrasi dalam Tata kelola pemerintahan, dimana fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan yang belum optimal pemanfaatannya.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dan inovasi teknologi sebagai landasan dalam penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di daerah.
3. Pembinaan, penumbuhan dan Pengelolaan Inovasi Daerah belum optimal.
4. SDM, infrastruktur dan Sarpras pendukung Riset dan Inovasi di Daerah masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2025-2029, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih telah menetapkan Visi Pembangunan NTB 5 Tahun ke depan yaitu **“BANGKIT BERSAMA MENUJU NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA”**. Terdapat 7 Misi yang mendukung pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Adapun Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung pencapaian VISI MISI Gubernur dan Wakil Gubernur mengacu pada Misi ke-7 Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu **“Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah”**.

Gambar 3.1. Sapta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Daerah



Sesuai dengan Visi Misi RPJMD ditetapkan 7 Sapta Cita sebagai prioritas Pembangunan Daerah. Dimana berdasarkan tugas pokok dan fungsinya BRIDA Provinsi NTB mengacu pada Prioritas Daerah 7 yaitu berkontribusi mewujudkan Transformasi Tata Kelola Daerah yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif.

Dari Visi Misi Kepala Daerah, dan Prioritas Daerah tersebut, selanjutnya secara spesifik diturunkan menjadi tujuan ke-14 pada RPJMD 2025-2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif, dan sasaran 25 yaitu: Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah, menjadi dasar perumusan Tujuan, Sasaran Strategis BRIDA Provinsi NTB dalam penanganan permasalahan pembangunan dan antisipasi isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

### **3.1 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah**

Implementasi hasil riset dan inovasi yang berkualitas yang dihasilkan BRIDA Provinsi NTB diharapkan dapat mengotimalkan tata kelola pemerintahan dan seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan RPJMD tersebut dan isu strategis yang telah dipetakan, maka dirumuskan tujuan Rencana Strategis BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagai berikut: **Terwujudnya Peningkatan Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.** Tujuan Perangkat Daerah BRIDA Provinsi NTB tersebut di ukur dengan dua indikator tujuan yaitu: (1) Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, dan (2) Persentase Inovasi yang Diterapkan dalam Pembangunan Daerah.

Indikator tujuan persentase kebijakan berbasis bukti digunakan untuk mengukur sejauhmana BRIDA Provinsi NTB melakukan riset atau kajian terhadap 10 program unggulan yang menjadi prioritas Gubernur/Wakil Gubernur selama 5 tahun kedepan. Rekomendasi hasil riset yang dihasilkan menjadi masukan/dasar penyusunan kebijakan atau perencanaan program/kegiatan selanjutnya. Adapun indikator tujuan kedua yaitu persentase inovasi yang diterapkan dalam pembangunan daerah digunakan untuk mengukur atau menunjukkan sejauh mana inovasi yang sudah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi NTB diakui/diterima atau terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di daerah.

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan, dan Sasaran dan Indikator Strategis BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2029

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN OPD /PROGRAM	Base line	Target						DO
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	3	4	5	6	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti			NA	50	60	70	80	90	100	jumlah Program unggulan daerah yang dilakukan riset/ study/ penelitian dibagi dengan 10 program unggulan daerah
			Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Persentase Rekomendasi Hasil Riset yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	NA	50	52,5	54,5	56,5	58,5	60	jumlah rekomendasi hasil riset yang di implementasi kan dibagi dengan total rekomendasi yang dihasilkan dari riset/studi yang dilaksanakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemanfaatan Hasil kelitbangan Dalam perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase rekomendasi kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan</li> </ul>	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan</li> </ul>	NA	10%	10%	15%	20%	25%	30%	

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN OPD /PROGRAM	Base line	Target						DO
			pengembangan potensi unggulan	dalam kebijakan Pembangunan daerah								
			<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>persentase kajian bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah</li> </ul>	NA	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah</li> </ul>	NA	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		Persentase Inovasi yang Diterapkan dalam Pembangunan Daerah			94,63	95,58	96,53	97,50	98,47	99,46	100,00	jumlah inovasi yang terkirim dan terverifikasi kemendagri dibagi dengan jumlah yang diusulkan ke kemendagri kali 100%
			Meningkatnya Kualitas Inovasi yang Dimanfaatkan Dalam	Tingkat Kematangan Inovasi	80	82	84	86	88	90	92	rata-rata tingkat kematangan inovasi



## Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun IKU pada Renstra BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2030 ini adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama BRIDA Provinsi NTB

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	-	50	60	70	80	90	100
2	Persentase Inovasi yang di Terapkan dalam Pembangunan Daerah	%	94,63	95,6	96,5	97,5	98,5	99,5	100
3	Persentase Rekomendasi Hasil Riset yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	%	0	50	52,5	54,5	56,5	58,5	60
4	Tingkat Kematangan Inovasi	Poin	80	82	84	86	88	90	92

## Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berfungsi untuk menilai kinerja pembangunan secara komprehensif. IKD mencakup dua komponen utama, yaitu indikator makro pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi ukuran langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan. Melalui IKD. Adapun IKD BRIDA Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) BRIDA Provinsi NTB

No	Indikator	satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aspek Daya Saing									
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,4	76,5	77,7	78,9	80	81,2	82,4
Aspek Pelayanan Umum									
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,55	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85

No	Indikator	satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Kinerja Kunci (IKK)									
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	0	50	60	70	80	90	100
4	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,99	1

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dalam rencana strategis ini memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang disusun dirumuskan dengan memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan dalam rencana strategis ini merupakan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung BRIDA Provinsi NTB.

Indikator tujuan Terwujudnya Peningkatan Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah diturunkan ke dalam dua sasaran, yaitu

meningkatnya kualitas hasil riset dan meningkatnya kualitas inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah. Sasaran meningkatnya kualitas hasil riset dapat dicapai melalui strategi dengan fokus pada melaksanakan riset-riset yang bersifat terapan untuk menyelesaikan permasalahan/tantangan/hambatan faktual yang dihadapi daerah saat ini. Disamping itu riset-riset terapan yang dilaksanakan dengan kolaborasi multi pihak/ lintas stakeholder dengan pendekatan kolaboratif pentahelix (Pemerintah, akademisi, media, bisnis, masyarakat) yang bekerjasama sebagai satu kesatuan berupaya untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Selanjutnya rekomendasi hasil riset yang dihasilkan dijadikan rujukan sebagai dasar perencanaan untuk penyusunan program/kegiatan sebagai bentuk implementasi hasil riset yang telah dilaksanakan.

Adapun sasaran meningkatnya inovasi daerah dapat dicapai melalui implementasi strategi berupa penumbuhan inovasi dimasyarakat, meningkatkan kualitas inovasi yang sudah dihasilkan serta memastikan inovasi yang ada dapat diterapkan atau dimanfaatkan di dalam pembangunan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan di daerah. Adapun Kegiatan Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat 9 dan ayat 11 menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentang inovasinya dan pemerintahan pusat memberikan penghargaan dan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik inovasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra BRIDA Provinsi NTB untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BRIDA Provinsi NTB

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset	Persentase Rekomendasi Hasil Riset yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi</li> <li>2. Mengintegrasikan hasil riset ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah</li> <li>3. Memperluas jejaring kerjasama Kolaborasi Pentahelix penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, dan pengelolaan kekayaan intelektual</li> </ol>	<p>Penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Penguatan pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah</p> <p>Pemanfaatan Hasil Riset sebagai landasan pengambilan kebijakan/ basis penyelesaian permasalahan di Daerah.</p> <p>Fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi</p> <p>Diseminasi serta Melakukan publikasikan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi secara langsung maupun pada jurnal ilmiah</p> <p>Pendataan basis data hasil riset</p> <p>Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, media dan masyarakat (pentahelix)</p>
	Meningkatnya Kualitas Inovasi yang Dimanfaatkan Dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Kematangan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penumbuhan, pengembangan, pendataan serta pemanfaatan inovasi daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah</li> <li>2. Mendorong pemanfaatan inovasi oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan kualitas inovasi melalui pengujian, sertifikasi, dan peningkatan TRL/Kematangan inovasi</li> </ol>	<p>Fasilitasi dan pembinaan dalam penumbuhan, pengembangan dan pendataan inovasi dan untuk memberikan apresiasi prestasi inovasi</p> <p>Melakukan pendataan basis data hasil inovasi</p> <p>Melakukan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual atas inovasi yang kembangkan</p>

Tabel 3.5 Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan BRIDA	Ket
Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, Media dan masyarakat (pentahelix)	Penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	
	Penguatan peran riset dan inovasi untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah	Penguatan pemanfaatan hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah	
	Peningkatan kapasitas dan literasi inovasi di kalangan ASN, pelajar, dan masyarakat	Pemanfaatan Hasil Riset sebagai landasan pengambilan kebijakan/ basis penyelesaian permasalahan di Daerah.	
		Fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi	
		Diseminasi serta Melakukan publikasikan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi secara langsung maupun pada jurnal ilmiah	
		Pendataan basis data hasil riset	
	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi daerah	Fasilitasi dan pembinaan dalam penumbuhan, pengembangan dan pendataan inovasi dan untuk memberikan apresiasi prestasi inovasi	
		Melakukan pendataan basis data hasil inovasi	
		Melakukan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual atas inovasi yang kembangkan	
	Peningkatan sinergi dalam rangka riset dan inovasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, media dan masyarakat (pentahelix)		

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan (Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif).**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

##### **A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Indikator:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah
4. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah

Kegiatan:

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
6. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

7. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
3. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
4. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
5. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Kegiatan:

1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
4. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
5. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
7. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
8. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan:

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

B. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Indikator:

1. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah
2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan

3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah
4. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Kegiatan:

- a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
2. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
3. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
4. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
5. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

- b. Inovasi dan Inovasi

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi
2. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan
3. Penyusunan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi
4. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi
5. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah
6. Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi
7. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran riset dan inovasi
8. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
10. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi

11. Fasilitas dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset
12. Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi.
13. Fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi
14. Fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
15. Fasilitas dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
16. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah
17. Fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
18. Fasilitas dan pembinaan untuk penataan basis data riset dan inovasi
19. Fasilitas dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat
20. Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator: Nilai Sakip Perangkat Daerah

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7. Penyediaan Bahan/Material
  8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan:
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  4. Pengadaan Mebel
  5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  4. Pemeliharaan Mebel
  5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan BRIDA Provinsi NTB. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Rencana program dilengkapi dengan outcome beserta target capaiannya dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Kerangka pendanaan indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BRIDA Provinsi NTB Periode 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					14.954.727.490		19.014.068.376		22.268.251.165		24.736.050.718		29.437.224.403	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.154.727.490		9.934.068.376		10.780.251.165		11.699.050.718		12.696.744.403	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Skor)	76,63	77,40	78,17	9.154.727.490	78,95	9.934.068.376	79,74	10.780.251.165	80,54	11.699.050.718	81,34	12.696.744.403	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					4.150.000.000		4.565.000.000		5.021.500.000		5.523.650.000		6.076.015.000	
meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	10	10	700.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	800.000.000	10	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potesi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	10	10	1.100.000.000	15	1.265.000.000	20	1.350.000.000	25	1.650.000.000	30	1.426.015.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	50	60	1.100.000.000	70	1.250.000.000	80	1.621.500.000	90	1.500.000.000	100	2.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	50	60	1.250.000.000	70	1.350.000.000	80	1.350.000.000	90	1.573.650.000	100	1.650.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.650.000.000		4.515.000.000		6.466.500.000		7.513.350.000		10.664.465.000	
meningkatnya pemanfaatan dan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	100	100	100.000.000	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.600.000.000	100	2.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	0	10	10	420.000.000	15	500.000.000	20	700.000.000	25	800.000.000	30	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	50	60	100.000.000	70	565.000.000	80	766.500.000	90	800.000.000	100	1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	10	10	1.030.000.000	10	2.450.000.000	10	3.500.000.000	10	4.313.350.000	10	5.664.465.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN					1.495.472.749.000		1.901.406.837.600		2.226.825.116.500		2.473.605.071.800		2.943.722.440.300	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra pada  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>		
<b>5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah</b>									
- Meningkatkan Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah				Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase)				
					Persentase Inovasi yang di Terapkan dalam Pembangunan Daerah (%)				
					Meningkatnya Kualitas Hasil Riset		Persentase Rekomendasi Hasil Riset yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah (%)		
					Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Skor)	5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.05.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
			meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potesi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase Kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potesi unggulan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.1.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.1.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.1.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
		Meningkatnya Kualitas Inovasi yang Dimanfaatkan Dalam Pembangunan Daerah			Tingkat Kematangan Inovasi (Poin)		
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Skor)	5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja  Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan  Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.05.01.1.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	5.05.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
			meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase Kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan dalam penyelesaian permasalahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen )	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.1.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.1.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.1.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen )	5.05.02.1.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
			meningkatnya pemanfaatan dan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.1.01.0002 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.1.01.0005 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Jumlah laporan Inovasi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0009 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.1.02.0012 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0013 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0023 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
			meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.1.01.0003 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				jumlah invensi dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	5.05.03.1.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.1.02.0018 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.1.01.0006 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				jumlah invensi dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	5.05.03.1.02.0003 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.1.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
			meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.1.01.0001 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	5.05.03.1.01.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				jumlah invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02 - Inovensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	5.05.03.1.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.1.02.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.1.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	5.05.03.1.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	5.05.03.1.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.1.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.1.02.0016 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.1.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	5.05.03.1.02.0021 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	5.05.03.1.02.0024 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.1.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,4	76,50	77,68	78,85	80,03	81,20	82,38	
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50	3,55	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	
<b>III</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	0	50	60	70	80	90	100	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,99	1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					75.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		140.000.000,00	Lelede	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	140.000.000,00		
5.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.480.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		30.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.480.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	30.000.000,00		
5.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.500.000,00		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		15.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00	1	9.075.000,00	1	15.000.000,00		
5.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					7.500.000,00		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		10.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00	1	9.075.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7.500.000,00		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		20.000.000,00	Lelede	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00	1	9.075.000,00	1	20.000.000,00		
5.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000.000,00		5.000.000,00		5.925.000,00		6.517.500,00		10.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.925.000,00	1	6.517.500,00	1	10.000.000,00		
5.05.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		25.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	25.000.000,00		
5.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					7.500.000,00		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		10.000.000,00	Lelede	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	33	33	33		33		33		33		33			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.900.247.490,00		4.900.568.376,00		5.390.626.165,00		5.614.463.218,00		5.812.104.403,00	Lelede	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	33	33	33	4.900.247.490,00	33	4.900.568.376,00	33	5.390.626.165,00	33	5.614.463.218,00	33	5.812.104.403,00		
5.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					49.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		75.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	49.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	75.000.000,00		
5.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		20.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					7.500.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		20.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					7.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		30.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1	7.500.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	30.000.000,00		
5.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		17.500.000,00	Lelede	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	17.500.000,00		
5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					31.000.000,00		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		52.500.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	52.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00		7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		10.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00	1	9.075.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					16.000.000,00		17.500.000,00		19.250.000,00		21.175.000,00		25.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	16.000.000,00	1	17.500.000,00	1	19.250.000,00	1	21.175.000,00	1	25.000.000,00		
5.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		7.500.000,00	Lelede	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	7.500.000,00		
5.05.01.1.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		10.000.000,00	Lelede	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00		62.000.000,00		90.800.000,00		99.880.000,00		117.250.000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	2	50.000.000,00	2	62.000.000,00	2	90.800.000,00	2	99.880.000,00	2	117.250.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					3.000.000,00		3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		4.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	3.630.000,00	1	4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					7.500.000,00		14.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00	Lelede	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1	7.500.000,00	1	14.000.000,00	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00		
5.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		8.250.000,00		10.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.250.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					17.500.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		35.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	2	17.500.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	27.500.000,00	2	35.000.000,00		
5.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					17.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		38.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	2	17.000.000,00	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	33.000.000,00	2	38.000.000,00		
5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					534.000.000,00		584.000.000,00		694.900.000,00		739.890.000,00		860.220.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		25.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	25.000.000,00		
5.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.000.000,00		6.000.000,00		6.600.000,00		7.260.000,00		10.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.600.000,00	1	7.260.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		15.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	15.000.000,00		
5.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.000.000,00		8.000.000,00		8.800.000,00		9.680.000,00		12.500.000,00	Lelede	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.800.000,00	1	9.680.000,00	1	12.500.000,00		
5.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00	Lelede	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	26.620.000,00		
5.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2.500.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.300.000,00		4.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.300.000,00	1	4.000.000,00		
5.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					7.500.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00	Lelede	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00		
5.05.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					90.000.000,00		100.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	135.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00		
5.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					135.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	135.000.000,00	1	145.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					15.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		30.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.200.000,00	1	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					225.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					170.000.000,00		715.000.000,00		300.000.000,00		330.500.000,00		367.550.000,00		
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	170.000.000,00	1	715.000.000,00	1	300.000.000,00	1	330.500.000,00	1	367.550.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00	Lelede	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.01.1.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00		
5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00	Lelede	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	88.000.000,00	1	96.800.000,00		
5.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00	Lelede	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	82.500.000,00	1	90.750.000,00		
5.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00	Lelede	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	125.000.000,00		
5.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.750.000.000,00		2.800.000.000,00		3.080.000.000,00		3.388.000.000,00		3.726.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	2.750.000.000,00	1	2.800.000.000,00	1	3.080.000.000,00	1	3.388.000.000,00	1	3.726.800.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					450.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00	Lelede	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
5.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.530.000.000,00		2.783.000.000,00		3.061.300.000,00	Lelede	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	2.300.000.000,00	1	2.300.000.000,00	1	2.530.000.000,00	1	2.783.000.000,00	1	3.061.300.000,00		
5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					500.000.000,00		575.000.000,00		875.000.000,00		1.142.500.000,00		1.302.820.000,00		
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	1	500.000.000,00	1	575.000.000,00	1	875.000.000,00	1	1.142.500.000,00	1	1.302.820.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1		1		1		1		1			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	1		1		1		1		1			
5.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					110.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	Lelede	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
5.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00	Lelede	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00		
5.05.01.1.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					30.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00	Lelede	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00		
5.05.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					30.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		40.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	40.000.000,00		
5.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00	Lelede	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	55.000.000,00	10	60.500.000,00	10	66.550.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		400.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	400.000.000,00		
5.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00		
5.05.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00	Lelede	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	310.000.000,00	1	320.000.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					4.150.000.000,00		4.565.000.000,00		5.021.500.000,00		5.523.650.000,00		6.076.015.000,00		
meningkatkan fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	10	10	700.000.000,00	10	700.000.000,00	10	700.000.000,00	10	800.000.000,00	10	900.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		
terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)		1	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00	1	900.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		1	1		1		1		1		1			
5.05.02.1.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
di Bidang Teknologi dan Inovasi															
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.02.1.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					275.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		1	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen )	0	0	1		1		1		1		1			
5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	2	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00		
5.05.02.1.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1	1	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					100.000.000,00		165.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		226.015.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	1	100.000.000,00	1	165.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	226.015.000,00		
5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.02.1.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.02.1.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.1.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	50	60	1.100.000.000,00	70	1.250.000.000,00	80	1.621.500.000,00	90	1.500.000.000,00	100	2.100.000.000,00		
5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.621.500.000,00		1.500.000.000,00		2.100.000.000,00		
Persentase Kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1	1.100.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.621.500.000,00	1	1.500.000.000,00	1	2.100.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.1.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan					150.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	0	0	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur					150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Reformasi Birokrasi															
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	0	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					200.000.000,00		200.000.000,00		221.500.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	1	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	221.500.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan					150.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)	0	0	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	0	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.02.1.01.0015 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang					0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Tersedianya Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.650.000.000,00		4.515.000.000,00		6.466.500.000,00		7.513.350.000,00		10.664.465.000,00		
meningkatkan fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	10	10	1.030.000.000,00	10	2.450.000.000,00	10	3.500.000.000,00	10	4.313.350.000,00	10	5.664.465.000,00		
5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					300.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		2.300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0	130.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	700.000.000,00		
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	0	0	1		1		1		1		1			
5.05.03.1.01.0001 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator) (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.03.1.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi					300.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
5.05.03.1.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan					60.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		364.465.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	0	0	1	60.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	364.465.000,00		
5.05.03.1.02.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi					0,00		150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah					140.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	0	1	140.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.03.1.02.0010 - Fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi					0,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0011 - Fasilitas dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah					0,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0015 - Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.					0,00		100.000.000,00		300.000.000,00		313.350.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	313.350.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.03.1.02.0016 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi					300.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	0	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03.1.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/org anisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03.1.02.0021 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03.1.02.0024 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
5.05.03.1.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.03.1.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset					150.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (Laporan)	0	0	1	150.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0018 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	50	60	100.000.000,00	70	565.000.000,00	80	766.500.000,00	90	800.000.000,00	100	1.100.000.000,00		
5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					300.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		2.300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03.1.01.0006 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi					1.350.000.000,00		3.315.000.000,00		5.266.500.000,00		6.313.350.000,00		8.364.465.000,00		
jumlah inovasi dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0	0	0,00	1	365.000.000,00	1	566.500.000,00	1	600.000.000,00	1	800.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah naskah kebijakan di bidang inovasi dan inovasi (Naskah)	0	0	0		1		1		1		1			
5.05.03.1.02.0003 - Penyusunan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi					0,00		165.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya kebijakan di bidang inovasi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang inovasi dan inovasi (Naskah)	0	0	0	0,00	1	165.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah					0,00		200.000.000,00		266.500.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	266.500.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
meningkatnya pemanfaatan dan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	100	100	100.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	2.700.000.000,00		
5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					300.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		2.300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	900.000.000,00		
	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0		1		1		1		1			
5.05.03.1.01.0002 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	400.000.000,00		
5.05.03.1.01.0005 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi					1.350.000.000,00		3.315.000.000,00		5.266.500.000,00		6.313.350.000,00		8.364.465.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi (Laporan)		0	0	0	100.000.000,00	1	600.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.800.000.000,00		
Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)		0	0	1		1		1		1		1			
Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)		0	0	0		1		1		1		1			
Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)		0	0	0		1		1		1		1			
5.05.03.1.02.0009 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi					0,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0012 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					0,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	KAB. LOMBOK BARAT	
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.03.1.02.0013 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi					0,00		100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.05.03.1.02.0023 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	NUSA TENGGARA BARAT	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	0	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra  
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah</b>				
1.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.1.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.1.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
		meningkatnya kajian yang bermanfaat sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
			5.05.02.1.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			5.05.02.1.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			5.05.02.1.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			5.05.02.1.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
			meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
		5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
		5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		
		5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
5.05.02.1.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.1.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.1.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			5.05.02.1.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			5.05.02.1.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
2.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.1.01.0004 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	5.05.03.1.02 - Inovasi dan Inovasi	
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	5.05.03.1.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	5.05.03.1.02.0016 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	5.05.03.1.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra BRIDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah									
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	-	50	60	70	80	90	100	
3.	Persentase Inovasi yang di Terapkan dalam Pembangunan Daerah	%	94,63	95,58	96,53	97,50	98,47	99,46	100	
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Riset yang Diimplementasikan dalam Pembangunan Daerah	%	0	50	52,5	54,5	56,5	58,5	60	
5.	Tingkat Kematangan Inovasi	Poin	80	82	84	86	88	90	92	

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Renstra BRIDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
2.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		Persentase	0	50	60	70	80	90	100	
3.	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah		Rasio	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,99	1	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) BRIDA Provinsi NTB Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur BRIDA Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual. Substansinya mengikuti hasil RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 untuk terwujudnya peningkatan inovasi daerah. Sebagai panduan perencanaan jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 Ini, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 dapat tersusun dengan lebih sistematis dan terarah dalam kerangka pencapaian target yang telah ditetapkan Mendukung pencapaian Visi Gubernur Wakil Gubernur BANGKIT BERSAMA MENUJU NTB PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA.